



# PENGEMBANGAN WILAYAH TERLUAR INDONESIA:

## MENILIK PENGELOLAAN RISIKO

Dr. Ir. Fitri Suryani, M.T. | Ir. ST. Trikariastoto, M.T.  
Ita Reinita Hadari, S.H., M.H. | Dr. Ir. Dwi Dinariana, M.T.  
Henni, S.T., M.T. | Andika Yuniarto, S.Kom., M.Si.  
Apt. Nefita Khairunnisa, S.Farm. | M. Rifqi Baihaqi, S.H.



# **PENGEMBANGAN WILAYAH TERLUAR INDONESIA: Menilik Pengelolaan Risiko**

Dr. Ir. Fitri Suryani, M.T.

Ir. ST. Trikariastoto, M.T.

Ita Reinita Hadari, S.H., M.H.

Dr. Ir. Dwi Dinariana, M.T.

Henni, S.T., M.T.

Andika Yuniato, S.Kom., M.Si.

Apt. Nefita Khairunnisa, S.Farm.

M. Rifqi Baihaqi, S.H.



*Cerdas, Bahagia, Mulia, Lintas Generasi.*



**PENGEMBANGAN WILAYAH TERLUAR INDONESIA:  
MENILIK PENGELOLAAN RISIKO**

**Fitri Suryani ...[et.al]**

Desain Cover :  
**Syaiful Anwar**

Sumber :  
[www.shutterstock.com](http://www.shutterstock.com)

Tata Letak :  
**Werdiantoro**

Proofreader :  
**Mira Muarifah**

Ukuran :  
**vi, 81 hlm, Uk: 15.5x23 cm**

ISBN :  
**978-623-02-7420-6**

Cetakan Pertama :  
**Oktober 2023**

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2023 by Deepublish Publisher**  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang.  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT DEEPUBLISH**  
**(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)**

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: [www.deepublish.co.id](http://www.deepublish.co.id)

[www.penerbitdeepublish.com](http://www.penerbitdeepublish.com)

E-mail: [cs@deepublish.co.id](mailto:cs@deepublish.co.id)

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENERBIT .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
BAGIAN PERTAMA : MEMAHAMI ARTI PENTING WILAYAH PERBATASAN .....	1
BAGIAN KEDUA : KETERPADUAN DAN MANAJEMEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR .....	12
BAGIAN KETIGA : TATA PELAKSANAAN PENINDAKLANJUTAN.....	50
BAGIAN EMPAT : MENYELISIK PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN .....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	81



# BAGIAN PERTAMA: MEMAHAMI ARTI PENTING WILAYAH PERBATASAN

---

Kawasan perbatasan di Indonesia terdiri dari dua macam matra, yakni matra darat dan matra laut. Kedua kawasan ini dinilai memiliki peran penting apabila ditinjau dari aspek kepentingan politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan sebab menyangkut hajat hidup banyak orang. Jika mengacu kepada aturan dari hukum laut internasional, kawasan matra laut berupa titik koordinat batas negara baik batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan batas landas kontinen, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Kawasan ini dibatasi oleh laut teritorial, khususnya pulau-pulau kecil terluar. Sementara untuk matra darat, mengacu kepada aturan internasional dan kesepakatan bilateral, ditandai dengan titik koordinat berupa patok-patok batas.

Dengan tingkat kepentingan yang tinggi dan pesatnya pembangunan kawasan perbatasan Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 menerbitkan sebuah payung hukum untuk pengelolaan tata ruang kawasan perbatasan dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Meskipun demikian, dalam pengimplementasiannya masih dinilai kurang. Hal ini mengacu kepada minimnya alokasi penganggaran yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan, baik perbatasan tertinggal maupun non-tertinggal, begitu pula dengan pengembangan infrastruktur kawasan perbatasan oleh pemerintah daerah.

Padahal pengembangan wilayah perbatasan amatlah penting bagi penyelenggaraan desentralisasi demi memecahkan kebutuhan masalah ketimpangan antarwilayah dan kesejahteraan ekonomi. Kebijakan desentralisasi ini memungkinkan setiap daerah untuk dapat mengelola dan mampu mendayagunakan sumber daya yang ada secara mandiri. Artinya ada potensi cukup besar bagi daerah untuk memaksimalkan kawasan perbatasan yang dimilikinya. Rajasa (2001) menyebutkan bahwa apabila

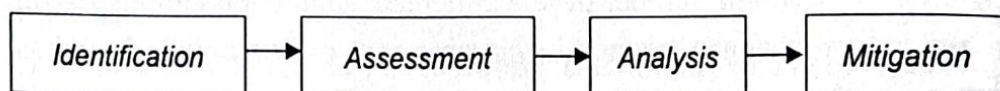
# BAGIAN KEDUA: KETERPADUAN DAN MANAJEMEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

---

Keterpaduan dan keserasian pengembangan infrastruktur merupakan dua asas penting penyelenggaraan infrastruktur. Keterpaduan dalam pengembangan infrastruktur mencakup keterpaduan pada tiap tahapan, mulai dari perencanaan, pembangunan, operasi pemeliharaan dan monitoring, serta evaluasi. Dengan demikian, penyelenggara pembangunan infrastruktur permukiman—termasuk lokasi pulau terluar, kawasan perbatasan, dan daerah pariwisata—melaksanakan upaya-upaya koordinasi intensif dengan berbagai pelaku pembangunan untuk mencapai keterpaduan dan keserasian penyelenggaraan infrastruktur.

Dalam upaya pelaksanaan pendekatan keterpaduan dan manajemen penyelenggaraan pembangunan infrastruktur tentunya ada beberapa risiko. Untuk mengatasi tantangan ini, ada beberapa pertimbangan manajemen yang bisa dilakukan, misalnya dengan mengaplikasikan cara yang berbeda sesuai dengan kebutuhan proyek mulai dari yang mudah hingga kompleks. Manajemen risiko dibangun melalui proses yang berhubungan dengan risiko dan dapat dilakukan dengan mudah tanpa memerlukan pemahaman teori matematika tingkat tinggi.

Pada dasarnya pendekatan manajemen risiko ada empat proses dasar yakni identifikasi, penilaian, analisis, dan mitigasi.



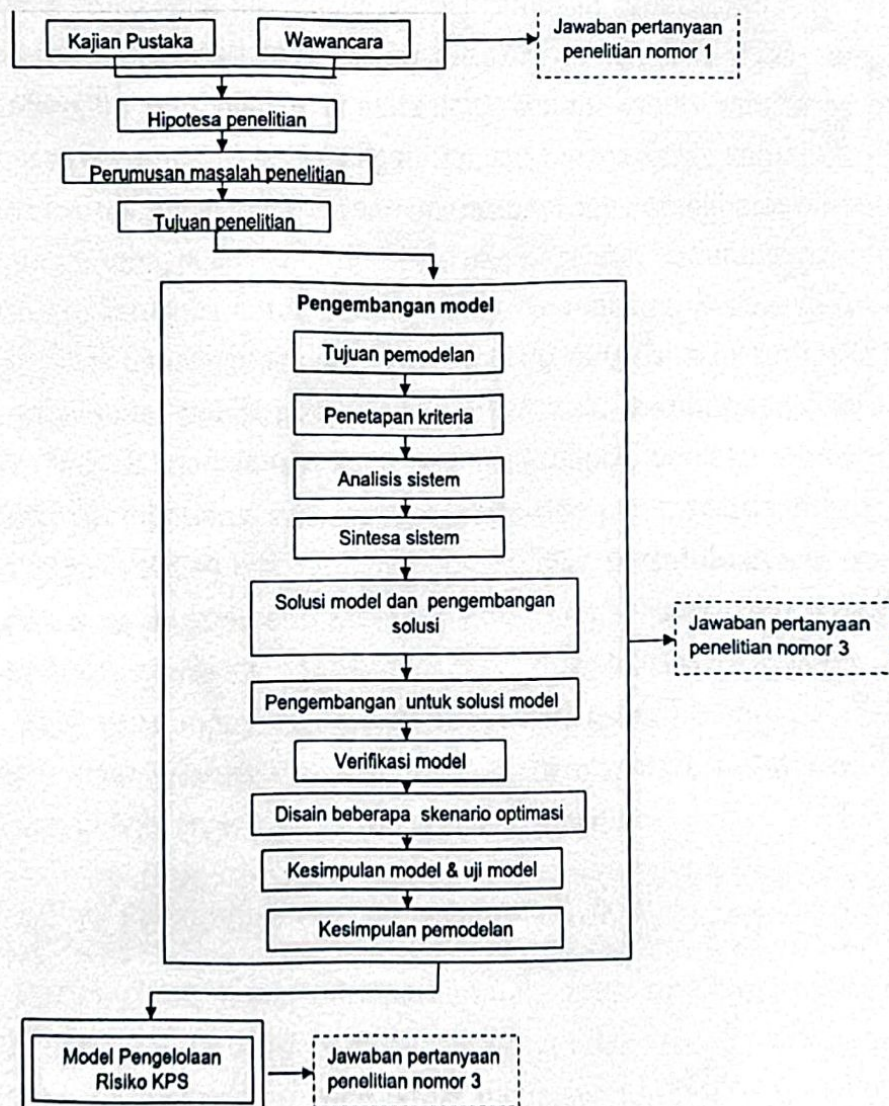
Gambar 6 Pendekatan Dasar Manajemen Risiko

Sumber: AACE (2005)



# BAGIAN KETIGA: TATA PELAKSANAAN PENINDAKLANJUTAN

Sebagai sebuah penelitian berbasis deskripsi dan *explanatory*, penelitian mengenai model manajemen risiko tentang kerja sama pemerintah dengan pihak swasta ini terikat kepada tahap-tahap sebagaimana yang ditunjukkan di dalam gambar berikut.



Gambar 3.1. Tahapan penindaklanjutan



# BAGIAN EMPAT: MENYELISIK PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN

---

Pendekatan segitiga pembangunan berkelanjutan dimaksudkan sebagai kerangka strategis dalam mengatasi tiga potensi konflik, yakni konflik sumber daya alam, pembangunan, dan kepemilikan dengan mengedepankan aspek ekonomi (pertumbuhan ekonomi dan efisiensi), lingkungan (proteksi lingkungan), dan kesetaraan (keadilan sosial dan peluang ekonomi) secara integral, holistik, dan berkelanjutan. Analisis segitiga pengembangan berkelanjutan ini dijadikan rujukan untuk melihat sejauh mana proses pembangunan daerah tertinggal di wilayah perbatasan memiliki sensitivitas terhadap aspek ekonomi, lingkungan dan kesetaraan tersebut sekaligus mengatasi konflik pembangunan, sumber daya dan kepemilikan.

Salah satu isu strategis penting lainnya dalam pengembangan kawasan perbatasan adalah pentingnya membangun hubungan *interstate*, *intergovernment*, dan *intercommunity* di wilayah perbatasan. Merujuk penjelasan dari Conca dan Dabelko (2002), lingkungan kerja sama akan menjadi katalisator lebih efektif untuk mereduksi potensi konflik kekerasan, membangun *broadering cooperation*, *fostering* (mendorong) *demiliterasi*, dan mempromosikan perdamaian. Dalam konteks ini, diingatkan bahwa apabila lingkungan kerja sama antarnegara, provinsi, dan komunitas secara formal dan secara langsung tidak kondusif, harus melakukan eksplorasi terhadap potensi lingkungan sebagai suatu panduan *peacemaking*, *peacebuilding*, dan *conflict prevention* berbasis kearifan lokal misalnya kekeluargaan, kesejahteraan, keadilan, keutuhan sebagai modal sosial dan kultural masyarakat di wilayah perbatasan dalam mengelola sumber daya alam dan ekonomi di perbatasan. Pada wilayah perbatasan di mana masyarakat



# DAFTAR PUSTAKA

---

- Alasad Raja, Ibrahim Motawa and Stephen Ouguniana, 2013, A System Dynamics-Based Model for Demand Forecasting in PP Infrastructure Project – A Case of Toll Road, Organization, Technology and Management in Construction International Journal.
- Dikun Suyono , 2003, Infrastruktur Indonesia, Sebelum, Selama dan Pasca Krisis. Bappenas.
- \_\_\_\_\_, 2005, Indonesia Infrastructure Development, Bappenas.
- Erwin Heurkens, 2009, Changing Public Private Partnerships Roles in Urban Area Development in the Netherlands, Delft University of Technology
- Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
- Praptono Djuanedi, 2007, Risiko Fiskal Terhadap APBN Kita Warta Anggaran Edisi 6 Tahun 2007, Direktorat Jenderal Anggaran.
- Parente, William J., “Public Private Partnership” dalam Workshop on “Fundamental Principles and Techniques for Effective Public Private Partnerships in Indonesia”, Jakarta.
- Saleh Iskandar, 2008, “Kebijakan, Strategi dan Program Rumah Susun Sederhana”, Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Jakarta, Juli.
- UU No. 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014
- Yescombe E.R, 2007, Public Private Partnerships Principles of Policy and Finance, Elsevier.



# PENGEMBANGAN WILAYAH TERLUAR INDONESIA:

## MENILIK PENGELOLAAN RISIKO

Pengembangan wilayah perbatasan amatlah penting bagi penyelenggaraan desentralisasi demi memecahkan kebuntuan masalah ketimpangan antarwilayah dan kesejahteraan ekonomi. Kebijakan desentralisasi ini memungkinkan setiap daerah untuk dapat mengelola dan mampu mendayagunakan sumber daya yang ada secara mandiri. Artinya ada potensi cukup besar bagi daerah untuk memaksimalkan kawasan perbatasan yang dimilikinya. Apabila kawasan perbatasan ini dikelola dengan baik, akan banyak mendatangkan peluang bagi peningkatan produksi yang selanjutnya akan menimbulkan berbagai efek pengganda terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun, dalam pelaksanaannya pengembangan ini tentunya memiliki tantangan dan risikonya sendiri. Baik tantangan maupun risiko ini perlu dikelola dengan baik agar alih-alih menjadi batu sandungan, malah menjadi faktor pemicu untuk pengembangan selanjutnya.

**Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)**  
Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581  
Telp/Fax : (0274) 4533427  
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

✉ [cs@deepublish.co.id](mailto:cs@deepublish.co.id)  
📍 Penerbit Deepublish  
📱 @penerbitbuku\_deepublish  
🌐 [www.penerbitdeepublish.com](http://www.penerbitdeepublish.com)



Kategori : Pengawasan Utilitas Ueun

ISBN 978-623-02-7420-6



9 786230 274206